

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT DI SMP KSM SONIT PULAU MASONI DAERAH PERBATASAN SULAWESI TENGAH

Trisandi¹, Sedya Santosa²

Mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan Islam¹, Dosen UIN Sunan Kalijaga²
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
trisandimpi@gmail.com¹, sedyasantosa28@gmail.com²

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan pendidikan terutama pada pemerataan pendidikan di daerah perbatasan wilayah Indonesia. Mengakibatkan adanya kecenderungan bahwa daerah-daerah perbatasan belum mampu mengelola pendidikannya secara mandiri. Sehingga banyak masyarakat di daerah perbatasan berinisiatif untuk mengelola dan mendirikan lembaga formal berbasis masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini, adalah untuk mengkaji lebih dalam mengenai implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengambilan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah, memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sekolah di wilayah perbatasan. Beberapa tahap dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis masyarakat yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Program yang telah dilaksanakan meliputi, proses belajar mengajar kegiatan pramuka dan pengembangan budidaya rumput laut. Pelaksanaan kegiatan sekolah masih belum berjalan secara maksimal disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya, Pulau Masoni masuk daerah tertinggal, faktor geografis yang jauh dijaukau sehingga terisolir dari keramaian, kurang jumlah guru, peserta didik, minim anggaran, minim fasilitas sarana prasarana dan kurangnya keahlian dalam mengelola sekolah.

Keywords: Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat, Daerah Perbatasan

Abstract

This article is motivated by educational disparities, especially in the distribution of education in the border areas of Indonesia. This results in a tendency that border areas are not yet able to manage their education independently. So that many people in border areas take the initiative to manage and establish community-based formal institutions. The purpose of this research is to examine more deeply about the implementation of community-based education management at SMP KSM Sonit Masoni Island, the Border of Central Sulawesi. The study used a descriptive qualitative method with data collection by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of community-based education management at SMP KSM Sonit Masoni Island, the Border of Central Sulawesi, has a major impact on the development of schools in border areas. Several stages in implementing community-based education are the planning, organizing, implementing and monitoring stages. The program that has been implemented includes the teaching and learning process of scouting activities and the development of seaweed cultivation. The implementation of school activities is still not running optimally due to several obstacles including, Masoni Island is included in underdeveloped areas, geographic factors that are far away from the crowd, insufficient number of teachers, students, minimal budget, minimal facilities and infrastructure and lack of expertise in managing schools.

Keywords: Community Based Education Management, Border Areas

Pendahuluan

Potret pendidikan di Indonesia menunjukkan tingkat progresivitas yang masih rendah untuk berkembang dan maju (Qur'ani Habib and Machali, 2016: 214). Melalui tes Programme For International

Student Assessment (PISA) yang dilakukan sejak tahun 2000, menerbitkan hasil pengetahuan murid dalam hal membaca, matematika dan ilmu pengetahuan serta apa yang dapat mereka lakukan dengan pengetahuan tersebut. Indonesia mendapatkan angka 371 dalam hal membaca, untuk

metematematika 379 dan 396 terkait dengan ilmu pengetahuan. Sementara Malaysia mendapatkan nilai lebih tinggi dari Indonesia, mendapatkan nilai membaca sebesar 415, Matematika 440 dan 438 untuk Sains (<https://www.tribunnews.com/>). Dalam hasil PISA menunjukan bahwa pendidikan di Indonesia masih kurang maksimal dalam menyelenggarakan pendidikan yang efektif dan kreatif. Disebabkan karena kondisi pendidikan di Indonesia mengalami keterpurukan, sebagaimana menurut data World Bank dalam laporan yang berjudul *Education Indonesia: From Crisis To Recovery* yang dikutip oleh Imam Machali dan Ara Hidayat (Machali and Hidayat, 2018:353) mengatakan bahwa kompleksitas pengorganisasian pendidikan di Indonesia diatur oleh tiga lembaga yang sama-sama mempunyai peranan sentral dalam pendidikan yaitu Depdiknas, Depdagri dan Depag. Kompleksitas ini berakibat fatal karena membuat rancunya pembagian tanggung jawab dan peranan manajerial, keterlambatan dan terpilah-pilahnya sistem perencanaan dan pembiayaan, serta perebutan kewenangan atas guru antara lembaga tersebut (Machali and Hidayat, 2018: 353).

Kesenjangan serta penurunan kualitas pada pendidikan mempengaruhi aspek penting seperti ekonomi sehingga memperlambat perkembangan dan kemajuan pada setiap daerah terutama daerah di perbatasan Indonesia. Setidaknya ada beberapa argumen yang mendukung pernyataan mengenai perlu adanya perbaikan pendidikan pada masyarakat lokal di perbatasan yaitu masyarakat perbatasan yang ada di NKRI cenderung masuk dalam kategori masyarakat yang tertinggal dari berbagai aspek pembangunan (Prasojo, 2013: 418). Hal ini karena masyarakat perbatasan lebih banyak hidup di pulau-pulau terpencil yang sulit terjangkau, tercantum dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menetapkan bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan (Archipelago State) (Yustiani, 2018: 122).

Hadinya Pendidikan Berbasis Masyarakat ditengah masyarakat membuat perubahan pada setiap daerah untuk mengelola pendidikan secara mandiri. Salah satunya masyarakat Pulau Masoni, yang mencoba menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan oleh masyarakat Pulau Masoni karena masyarakat lokal mulai sadar terhadap pentingnya pendidikan. Dengan kata lain, pendidikan berbasis masyarakat yang diselenggarakan adalah konsep pendidikan “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat” (Suharto, 2005: 333).

Pulau Masoni merupakan wilayah perbatasan Sulawesi Tengah bagian Timur atau perbatasan langsung dengan Provinsi Maluku Utara (Ternate). Pulau Masoni termasuk wilayah tertinggal di Indonesia, wilayahnya yang tertinggal mempengaruhi semua aspek penting seperti ekonomi dan pendidikan. Kebutuhan di Pulau ini hanya bergantung pada alam yaitu dengan cara melaut atau menangkap ikan sebagai sumber utama makanan di

Pulau Masoni. Untuk pendidikannya tidak terlalu menggembirakan karena banyak masyarakat di pulau ini yang putus sekolah, akibat akses yang cukup jauh untuk melanjutkan studi yang lebih tinggi.

Pengembangan pendidikan formal berbasis masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat Pulau Masoni, memberikan perubahan pada masyarakat, terutama untuk anak-anak Pulau Masoni yang saat ini sudah dapat melanjutkan studinya ke tingkat menengah pertama. Lembaga yang didirikan oleh masyarakat Pulau Masoni yaitu sekolah menengah pertama (SMP) yang dibantu oleh pihak Yayasan Karya Sama Membangun, dimana yayasan ini bergerak pada pendidikan di daerah perbatasan. Nama sekolah yang didirikan oleh masyarakat Pulau Masoni bersama Yayasan KSM yaitu SMP KSM Sonit. Berangkat dari permasalahan yang sangat kompleks di Pulau Masoni dan pendirian sekolah secara mandiri, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang pengelolaan sekolah yang dilakukan masyarakat dan pelaksanaan program SMP KSM Sonit.

A. Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat

1. Manajemen Pendidikan

Manajemen merupakan cabang ilmu dan seni dalam mengelola suatu lembaga yang menerapkan perencanaan yang matang, pengorganisasian, menggerakkan serta melakukan pengawasan agar lembaga yang dijalankan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya (Sodiah, 2016: 90). Menurut Shrode dan Voich, menyatakan bahwa kerangka dasar manajemen meliputi: “philosophy, Assumption, Principles, and theory, which are basic to the study of any discipline of management”. Secara sederhana dikatakan bahwa falsafah merupakan pandangan hidup atau persepsi tentang kebenaran yang dikembangkan dari berfikir praktis (Soter, 2018: 20). Artinya manajemen yang dimaksud oleh Shrode dan Voich yaitu suatu cara berfikir yang terkondisikan dengan lingkungan, perangkat organisasi, nilai-nilai dan keyakinan yang menjadi dasar tanggung jawab seorang manajer.

Menurut George R. Terry yang dikutip oleh Suwandi, Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber daya lainnya (Suwandi, 2017: 3). Diperkuat oleh penjelasan Luther Gulick yang dikutip oleh I Ketut Soter dalam jurnalnya bahwa manajemen dikatakan sebagai ilmu karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematis berusaha

memahami mengapa dan bagaimana orang bekerja sama (Soter, 2018: 18).

Pendidikan merupakan suatu bentuk untuk memanusiakan manusia. Pengangkatan manusia muda ketaraf mendidik. Artinya bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia yang dulu belum mengetahui apa-apa dengan adanya pendidikan seseorang dengan mengetahui bahkan dapat mengembangkannya kearah yang lebih baik. Dalam Dictionary of Education dinyatakan bahwa pendidikan adalah: (a) proses seseorang mengembangkan kemampuan, sikap, dan tingkah laku lainnya di dalam masyarakat tempat mereka hidup, (b) proses sosial yang terjadi pada orang yang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol (khususnya yang datang dari sekolah), sehingga mereka dapat memperoleh perkembangan kemampuan sosial dan kemampuan individu optimal (Soter, 2018: 18).

Manajemen pendidikan pada hakeketnya adalah menyangkut tujuan pendidikan, manusia yang melakukan kerjasama proses sistemik dan sistematis serta sumber-sumber yang didayagunakan. Bidang manajemen pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan penataan terhadap sumber daya pendidikan (Mulyasa, 2003: 23). Dalam pengelolaan Lembaga pendidikan dibutuhkan manajemen pendidikan dalam melihat fungsi-fungsi manajemen agar pengelolaan sekolah atau lembaga pendidikan berjalan secara efektif dan efisien. Ada empat fungsi manajemen yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (pelaksanaan), dan controlling (pengawasan)" (Arikunto and Yuliana, 2012: 2-3). Fungsi manajemen dapat diterapkan pada pengelolaan lembaga pendidikan. Hal ini sebagai acuan untuk mengelola lembaga secara efektif dan efisien. Namun, harus disadari bahwa fungsi manajemen akan berjalan dengan baik jika stakeholder dan semua anggota ikut serta dalam memfungsikan fungsi manajemen. Hal ini karena fungsi manajemen merupakan sebuah sistem yang dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam mengatur sebuah lembaga.

2. Pendidikan Berbasis Masyarakat

Salah satu problematika kehidupan bangsa yang terpenting di abad ke-21 adalah moral dan akhlak. Kemerosotan nilai-nilai moral yang mulai melanda masyarakat kita saat ini tidak lepas dari ketidakefektifan penanaman nilai-nilai moral, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara keseluruhan (Nurdin, 2012: 187). Hal ini akibat banyaknya masyarakat yang kurang menyerap dan mengerti artinya pendidikan secara baik. Sehingga Pendidikan berbasis masyarakat hadir untuk memperbaiki ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Secara konseptual, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno Surakhmad yang dikutip oleh Zubaidi dalam jurnalnya Community-Based Education (Pendidikan Berbasis Masyarakat) atau CBE adalah

model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip "dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat" (Masdudi, 2014: 97). Seperti halnya menurut Compton and H. McClusky yang dikutip oleh Imam Machali dan Ara Hidayat disebut dengan istilah "community education for development" merupakan sebuah sistem yang memberikan peluang sama bagi setiap orang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pembelajaran seumur hidup (Machali and Hidayat, 2018: 354).

Konsep Pendidikan berbasis masyarakat muncul akibat adanya anjuran undang-undang untuk melaksanakan pendidikan sepanjang hayat. Artinya pendidikan harus dilaksanakan baik secara formal, informal maupun non formal karena pendidikan saat ini dihadapi dengan perkembangan dunia yang sangat cepat sehingga pendidikan berperan aktif dalam melaksanakan tugas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Pendidikan berbasis masyarakat berasumsi bahwa masyarakat juga mempunyai andil yang sama dalam menjalankan roda pendidikan tujuannya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang kompleks di dalam masyarakat.

Menurut Sihombing dan Supriadi dikutip oleh Toto Suharto, Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya bukan hanya dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan luar sekolah (nonformal) sebagaimana dalam UU No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa "Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya" (Suharto, 2005: 334). Ditegaskan juga pada ayat 6 bahwa: "Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan" (Masduki, 2019: 115). Artinya pendidikan berbasis masyarakat juga dapat melaksanakan pendidikan secara formal maupun informal sesuai kebutuhan masyarakat pada suatu daerah. Pendidikan yang berlangsung di masyarakat akan efektif ditumbuhkembangkan oleh tokoh masyarakat (Nurdin, 2012: 187). Peran masyarakat terhadap pendidikan sangat besar seperti keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, pendelegasian kewenangan, konsultasi masalah sekolah sampai sumbangan dan pelayanan terhadap sekolah. Model peran masyarakat ini agar memberikan suatu dampak yang baik terutama pada hubungan antara pihak sekolah dan masyarakat.

Menurut Resbin L. Sihite dalam M. Rohman yang dikutip oleh Sodiah, mengemukakan tujuh peran serta masyarakat dalam pendidikan, yaitu:

- a. Sebagai sumber pendidikan
- b. Sebagai pelaku pendidikan
- c. Pelaksana pendidikan
- d. Pengguna hasil pendidikan
- e. Perencanaan pendidikan
- f. Pengawasan pendidikan
- g. Evaluasi program pendidikan (Sodiah, 2016: 94).

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan pendidikan yang mengutamakan kebutuhan masyarakat. Artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek atau pelaku pendidikan langsung. Sehingga masyarakat dituntut untuk berperan serta berpartisipasi dalam setiap program pendidikan yang diselenggarakan. Dengan demikian, masyarakat diberi peluang dalam mengelola, mendesain, merencanakan, membiayai serta menilai apa yang diperlukan secara spesifik dalam penyelenggaraan sebuah program pendidikan di tengah masyarakat.

B. Dinamika Kehidupan Masyarakat Lokal

Indonesia merupakan negara kepulauan (lebih kurang 17.508 buah pulau besar dan kecil) yang memiliki wilayah laut seluas 5.866 juta km persegi, sedangkan wilayah daratan hanya seluas 2.027 juta km persegi atau sepertiga wilayah laut Indonesia (Wijaya and Dkk, 2009: 353). Pasal 25A UUD 1945 telah menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan Undang-Undang” (Juditha, 2014: 111). Wilayahnya yang dikelilingi pulau-pulau kecil yang tersebar di berbagai daerah menyebabkan adanya keterlambatan dalam segi pembangunan baik dari sumber daya manusia, ekonomi bahkan yang paling urgen yaitu pendidikan juga tertinggal. Sehingga isu-isu mengenai pulau-pulau di perbatasan di Indonesia selayaknya menjadi perhatian yang lebih serius oleh berbagai pihak baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat karena pulau-pulau kecil di perbatasan daerah maupun negara merupakan kunci perkembangan Indonesia yang lebih maju.

Setidaknya ada beberapa argumen yang sangat mendukung untuk mengkaji lebih dalam mengenai kehidupan lokal pada masyarakat di perbatasan. Pertama, daerah perbatasan adalah wilayah strategis yang menjadi wajah sebuah negara, dalam hal ini Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), karena wilayah-wilayah tersebut menjadi pintu masuk bagi warga asing atau pihak luar lainnya yang berkepentingan untuk masuk ke wilayah NKRI. Kedua, masyarakat perbatasan yang ada di NKRI cenderung masuk dalam kategori masyarakat yang tertinggal dari berbagai aspek pembangunan. Ketiga, kajian mengenai masyarakat lokal di wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia belum terlalu menggembirakan baik dari segi jumlah (Prasojo, 2013: 418).

Melalui studi yang dilakukan G.J. Hugo (dkk) yang dikutip oleh Zainuddin Djafar, mobilitas penduduk yang terjadi di berbagai wilayah perbatasan Indonesia dapat dipahami dan hal tersebut adalah refleksi dan respon atas terjadinya ketimpangan ekonomi, kondisi sosial dan kenyamanan yang tidak kondusif bagi suatu bentuk kehidupan yang stabil dan mapan di wilayah perbatasan yang jauh dari pemerintahan pusat di Jakarta (Djafar, 2008: 112). Wilayah perbatasan juga sangat minim infrastruktur mengakibatkan informasi sangat sulit

untuk diakses oleh masyarakat (R.A.P, 2015: 89). Kondisi tersebut yang menyebabkan masyarakat lokal yang ada di perbatasan kurang berkembang seperti layaknya daerah-daerah di perkotaan. Perhatian dan penekanan pembangunan pada aspek-aspek sosial-ekonomi di wilayah perbatasan jelas harus pula mendapat prioritas yang sama. Pembangunan yang dirasakan selama ini hampir pada semua wilayah perbatasan di Indonesia berjalan amat lamban (Djafar, 2008: 108). Menurut Lia Rosliana dkk yang dikutip oleh Siti Muri'ah, terdapat berbagai isu penting di perbatasan antara lain: Isu Batas Negara, Pertahanan dan Keamanan Daerah Perbatasan, Isu Kelembagaan, Isu Perekonomian Masyarakat, Isu Pendidikan, Isu Infrastruktur, Isu Potensi Daerah. Keberadaan berbagai isu tersebut sebenarnya telah terjadi sekian lama, akan tetapi sampai sekarang isu-isu tersebut masih relevan di kawasan perbatasan dan menjadi bahan permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan (Muri'ah, 2018: 138).

C. Problem Pendidikan di Perbatasan

Pendidikan nasional memiliki cita-cita untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya hal itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945. Sehingga pemerataan pendidikan dari pusat sampai ke pulau-pulau terpencil di perbatasan Indonesia perlu disetarakan tanpa terkecuali. Sebagaimana Pasal 26 hasil Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Right) tahun 1948 menyebutkan: “Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit” (Machali, 2012: 2).

Berdasarkan kutipan di atas, menurut Imam Machali dalam jurnalnya mengatakan, pada dasarnya semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas terutama pada level pendidikan dasar. Visi dan misi pendidikan nasional berangkat dari paradigma pembangunan pendidikan nasional yaitu “membangun manusia Indonesia seutuhnya, yang berfungsi sebagai subyek yang memiliki kapasitas untuk mengaktualisasikan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal” (Machali, 2012: 2). Sehingga pemerintah daerah harus mengupayakan serta komitmen dalam mengembangkan sumber daya manusia secara maksimal baik melalui pemberdayaan ekonomi ataupun pendidikan agar nawa-cita bangsa dalam pemerataan keadilan dan pembangunan dapat dirasakan oleh setiap daerah-daerah termasuk daerah di pulau-pulau kecil bahkan yang paling perbatasan Indonesia.

Permasalahan di dunia pendidikan di daerah terpencil maupun daerah tertinggal, dan perbatasan. Sulitnya membangun sarana pendidikan standar karena kesulitan komunikasi atau langkanya alat-alat bantu proses belajar mengajar. Begitu pula tuntutan sistem pendidikan yang standar mengenai

jenjang pendidikan serta kurikulum nasional menghambat daerah 3T dan perbatasan untuk mengejar ketertinggalan (Suciati, 2016: 77). Berbagai faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan di kawasan perbatasan seperti kurangnya tenaga guru, minimnya fasilitas dan sarana prasarana, maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya pendidikan turut andil dalam menciptakan jurang pemisah dengan kondisi pendidikan di perkotaan (Yosada, Prosiding) Daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM-nya. Atas dasar itu untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan yang bermutu, jelas diperlukan perhatian dan analisisnya terhadap segenap sub-sistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar (Agung, 2012: 175). Sehingga pendidikan di daerah perbatasan sangat memerlukan kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan tujuannya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pada tahun 2015, telah ditetapkan 122 kabupaten sebagai daerah tertinggal dan 43 daerah terdepan dan terluar berdasarkan Surat No. 2421/Dt.7.2/04/2015 tanggal 21 April 2015 oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN/BAPPENAS) (Itasari, 2018: 182). Menurut Bappenas, BPS and World Bank yang dikutip oleh Syachrumasyah Asri dalam jurnal Elfendri, mengatakan bahwa Perencanaan Jangka Panjang Pendidikan, target untuk peningkatan pemerataan (equity), dihitung dari akses perolehan pendidikan dasar dan menengah akan dicapai secara universal pada tahun 2015. Pelaksanaan undang-undang tersebut akan dapat berjalan efektif bila kemampuan sumberdaya manusia (SDM) di daerah ditingkatkan kualitasnya (Asri, 2017: 27). Langkah yang sangat baik untuk memajukan pendidikan pada daerah-daerah yang kurang tersentuh dengan pendidikan yang layak seperti halnya dengan pendidikan daerah lain. Sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang sejak lama terjadi di lingkungan pendidikan seperti pembangunan sarana dan prasarana dan juga permasalahan pada lingkungan guru seperti guru honor yang sampai saat ini masih digaji tidak sesuai dengan jam kerja mereka. Menyebabkan banyaknya guru yang meninggalkan daerah tersebut karena persoalan gaji dan ada juga yang bertahan untuk mengajar karena mempunyai kepedulian yang sangat besar terhadap pendidikan terutama untuk memajukan daerah tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (field research), dengan jenis penelitian kualitatif yang

bersifat deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya. Sehingga melalui penelitian ini, diupayakan untuk mengungkap dan menyikap fakta yang ada di lapangan (kondisi real) (Wasito, 1997: 21). Hal ini dimaksudkan untuk dapat menguraikan kondisi/keadaan real di lapangan terkait dengan implementasi manajemen pendidikan berbasis masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah. Sementara sumber data dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber yakni, sumber data dokumen dan sumber data informan. Adapun informan yang dijadikan narasumber dalam penelitian ini, ialah Masyarakat Pulau Masoni, Yayasan Karya Sama Membangun, Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Administrasi.

Pembahasan

A. Sejarah SMP Karya Sama Membangun (KSM) Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah.

SMP KSM Sonit secara geografis, berada di wilayah perbatasan Sulawesi Tengah bagian timur atau perbatasan langsung dengan Maluku Utara (Ternate). Secara spesifik SMP KSM Sonit berada di Desa Sonit Kecamatan Bokan Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, dengan jumlah penduduk kurang lebih 150 kepala rumah tangga.

Latar belakang berdirinya SMP KSM Sonit, yaitu diawali dengan kunjungan Ketua Yayasan Karya Sama Membangun Pusat Banggai yang bernama Bapak Herto Sampelan, S.Pd pada tahun 2003. Beliau tertarik karena Desa Sonit mempunyai Sekolah Dasar (SD) yang mencetak tamatan puluhan siswa, sementara lulusan biasanya sebagian kecil yang dapat melanjutkan ke tingkat SMP atau sederajat, itupun belum tentu tamat dikarenakan jarak yang begitu jauh serta transportasi yang tidak mendukung, sementara di Desa Sonit belum ada SMP atau sederajat yang didirikan. Ternyata masyarakat Pulau Masoni juga berharap agar adanya SMP di Pulau Masoni. Dengan persamaan itu, pihak yayasan mengadakan musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa, Sekdes, BPD, Aparat Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan masyarakat dan hasil sepakat untuk membangun SMP yang diberi nama SMP KSM Sonit dan dikelola oleh Masyarakat dan Yayasan.

B. Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP KSM Sonit

Proses Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah, dilakukan melalui empat tahap penting, yaitu; perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan Pengawasan.

1. Tahap Perencanaan

Pulau Masoni merupakan wilayah yang berada di perbatasan Sulawesi Tengah bagian timur

atau lebih dekat dengan salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku Utara. Wilayahnya yang terpencil membuat wilayah ini tertinggal pada semua bidang termasuk pendidikan. Pihak Yayasan Karya Sama Membangun (KSM) yang bergerak dibidang pendidikan pada waktu itu tepatnya pada tahun 2002, merencanakan untuk bekerja sama dengan masyarakat Pulau Masoni untuk melakukan pembangunan sekolah formal yang diwadahi oleh masyarakat itu sendiri. Berikut ini tahapan perencanaan yang dilakukan oleh Yayasan kepada masyarakat dalam membangun sekolah di Pulau Masoni.

a. Observasi

Pihak Yayasan Karya Sama Membangun yang bergerak dibidang pendidikan pada tahun 2002 melakukan observasi awal ke Pulau Masoni perbatasan Sulawesi Tengah. Tujuan Yayasan pada saat itu pada dasarnya ingin membantu anak-anak suku Bajo yang tersebar di pulau-pulau Sulawesi Tengah. Salah satunya Pulau Masoni yang merupakan wilayah yang dihuni oleh mayoritas Suku Bajo. Adanya persamaan suku dengan masyarakat Pulau Masoni sehingga pihak yayasan meninjau langsung dan melihat kondisi masyarakat Pulau Masoni. Hasil observasi yang dilakukan oleh pihak Yayasan ditemukan banyak sekali masyarakat Pulau Masoni yang putus sekolah akibat tidak adanya lembaga formal pada tingkat menengah pertama (SMP) di daerah tersebut dan aksesnya pun ke kecamatan yang merupakan tempat untuk melanjutkan studi belum tersedia.

Kondisi masyarakat Pulau Masoni dari segi pendidikan masih cukup tertinggal. Sehingga respon yayasan karya sama membangun (KSM) setelah melakukan observasi dan melihat kondisi masyarakat yaitu perlu adanya bantuan dibidang pendidikan agar pulau perbatasan Sulawesi Tengah tidak lagi tertinggal dan dapat berkembang.

b. Musyawarah

Setelah tinjauan langsung ke lokasi (Pulau Masoni) pihak Yayasan karya sama membangun (KSM) tepatnya pada tahun 2002, langsung melakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh penting di Pulau Masoni seperti Kepala Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama. Musyawarah yang dilakukan oleh pihak Yayasan dengan sejumlah tokoh masyarakat agar menemukan jalan keluar terhadap permasalahan yang urgen di Pulau Masoni. Hasil dari muswarah tersebut perwakilan dari sejumlah masyarakat menyetujui usulan dari Yayasan KSM. Namun, harus diadakan rapat bersama masyarakat secara terbuka agar adanya kesepakatan dengan masyarakat

dan mendengar usulan serta saran dari masyarakat yang lain.

c. Rapat Terbuka

Setelah melakukan musyawarah bersama perwakilan masyarakat Pulau Masoni, selanjutnya pihak Yayasan melakukan rapat terbuka yang dihadiri sejumlah, Kepala Desa, BPD, Kepala Sekolah SDN Sonit dan Masyarakat Pulau Masoni. Dalam agenda membahas pembangunan sekolah tingkat menengah pertama (SMP) di Pulau Masoni. Hasil rapat terbuka tersebut, menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya, Yayasan karya sama membangun (KSM) sebagai pengelola tertinggi sekolah, segala urusan anggaran sekolah diserahkan kepada Yayasan dan masyarakat, pemilihan kepala sekolah harus dirapatkan bersama masyarakat, kurikulum sekolah mengikuti pemerintah, untuk tanah atau tempat pembangunan sekolah diserahkan kepada masyarakat, dan pihak sekolah harus bekerjasama dengan pemerintah. Pada hasil rapat tersebut bahwa pembangunan sekolah di Pulau Masoni secara menyeluruh disetujui oleh pihak masyarakat. Sehingga pihak Yayasan bergerak cepat untuk membentuk panitia untuk mengurus pembangunan sekolah.

2. Tahap Pengorganisasian

Setelah melakukan tahapan perencanaan yang matang yang ditandai dengan adanya respon masyarakat terhadap pembangunan dan pengembangan sekolah di Pulau Masoni. Berikut ini, hal yang dilakukan oleh pihak Yayasan KSM bersama masyarakat dalam tahap pengorganisasian sekolah:

- a. Pemilihan Kepala Sekolah
- b. Pemilihan Ketua Komite Sekolah
- c. Perekrutan Guru
- d. Perekrutan Peserta Didik
- e. Membangun Mitra Kerja dengan Pemerintah
- f. Kegiatan Pembelajaran
- g. Anggaran Sekolah
- h. Kurikulum Sekolah

3. Tahap Pelaksanaan

SMP KSM Sonit merupakan lembaga formal yang didirikan oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat di wilayah perbatasan. SMP KSM mengembangkan beberapa program sekolah diantaranya:

a. Proses Belajar Mengajar

SMP KSM Sonit menerapkan program proses belajar mengajar di dalam kelas mengikuti program dari pemerintah. Sekolah ini menerapkan kurikulum 2013 sebagai acuan dalam melaksanakan pembelajaran. Walaupun dalam melaksanakan kurikulum 2013 masih banyak terkendala oleh beberapa faktor yaitu

fasilitas pembelajaran yang belum lengkap, ruangan kelas yang belum memadai dan kondisi guru yang belum siap dalam menerapkan kurikulum 2013. SMP KSM Sonit memiliki 10 mata pelajaran, dengan total alokasi waktu yang dibutuhkan sejumlah 20 jam. Mata pelajaran ini dikembangkan dan diajarkan kepada peserta didik.

b. Kegiatan Pramuka

Kegiatan pramuka merupakan kegiatan ekstra yang sering dilakukan oleh semua sekolah, salah satunya SMP KSM Sonit juga turut mengembangkan program pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Kegiatan pramuka di SMP KSM Sonit dijadwalkan satu tahun satu kali pelaksanaan. Namun, jika dana sekolah tidak mencukupi maka kegiatan pramuka ditunda, hal ini sering terjadi di SMP KSM Sonit, ketika hendak melaksanakan kegiatan pramuka terhambat karena dana anggaran sekolah sangat minim sehingga penyelenggaraannya pun ditunda sampai tahun berikutnya.

c. Pengembangan Budidaya Rumput Laut

Secara geografis, SMP KSM Sonit berada di wilayah yang sangat jauh dari keramaian, wilayahnya berada di pulau kecil Indonesia. Pokok pekerjaan di Pulau ini yaitu sebagai nelayan, dimana masyarakatnya hidup bersama Alam dan memanfaatkan Alam sebagai sumber kebutuhan masyarakat. Pengembangan Budidaya rumput laut sebagai kegiatan ekstrakurikuler di SMP KSM Sonit merupakan kegiatan pembelajaran yang dilakukan diluar sekolah. Hal ini dilakukan agar peserta didik paham tentang pengembangan budidaya rumput laut, yang selama ini dijadikan sebagai pokok pekerjaan oleh masyarakat Pulau Masoni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kegiatan budidaya rumput laut dilakukan setiap bulan tergantung pada kondisi alam. Karena kondisi alam sangat menentukan perkembangan dari rumput laut dan mencegah adanya kerusakan pada rumput laut.

Kegiatan budidaya rumput laut tidak terlalu berjalan secara maksimal karena kondisi alam di Pulau Masoni selalu berubah-ubah. Sehingga pihak sekolah menganjurkan peserta didik cukup mengamati masyarakat Pulau Masoni dalam membudidayakan rumput laut sampai tahap pengeringan. Hal ini dilakukan agar peserta didik tidak ketinggalan dalam proses pembelajaran ekstra yang telah diagenkan oleh sekolah.

4. Tahap Pengawasan

Berikut ini pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelola sekolah di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah.

a. Yayasan Karya Sama Membangun

Yayasan Karya Sama Membangun (KSM) merupakan salah satu pihak yang bertugas mengawasi kegiatan sekolah di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah. Yayasan KSM bertugas mengawasi seluruh kegiatan sekolah dari program sekolah, anggaran sekolah, sarana prasaran, sampai kegiatan proses pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pihak Yayasan mengvaluasi kegiatan sekolah pada akhir semester. Tujuan dari pengawasan ini agar adanya perbaikan pada program yang telah diadakan.

Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Yayasan KSM, seperti halnya menurut narasumber yaitu agar adanya perkembangan dan kemajuan sekolah di wilayah perbatasan. Karena di wilayah perbatasan sangat jarang sekali diawasi oleh pemerintah daerah setempat, mungkin disebabkan wilayahnya yang jauh untuk dijangkau dengan kondisi geografis yang cukup ekstrim untuk dilewati.

b. Kepala Sekolah

Kepala sekolah SMP KSM Sonit bertugas mengawasi kegiatan sekolah yang telah di programkan, dari pengelolaan anggaran, jadwal mengajar, jadwal ujian, sarana prasarana sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), kedisiplinan peserta didik, Proses pembelajaran di dalam kelas, kegiatan ekstrakurikuler sekolah serta output lulusan sekolah. Untuk lulusan SMP KSM Sonit terus diawasi oleh kepala sekolah setiap tahunnya, mengingat tujuan dari sekolah untuk menghasilkan lulusan yang dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tercatat dua tahun terakhir yaitu pada tahun 2019 ada 12 peserta didik yang dapat melanjutkan studinya ke tingkat SMA dari jumlah keseluruhan ada 14 peserta didik dan di tahun 2020, ada 11 peserta didik yang dapat melanjutkan studinya dari jumlah keseluruhan 13 peserta didik.

C. Hambatan Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP KSM Sonit

Pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat telah diterapkan oleh pihak SMP KSM Sonit mempunyai banyak sekali hambatan sehingga mempengaruhi jalannya perkembangan sekolah di Pulau Masoni, diantaranya:

a. Wilayah Tertinggal

Pulau Masoni masuk dalam daftar wilayah tertinggal di Indonesia. Dari daftar wilayah tertinggal, wilayah Kabupaten Banggai Laut termasuk dalam

daftar. Wilayah Kabupaten Banggai Laut memiliki luas wilayah 725,67 Km², jumlah penduduknya 16.018 orang, jumlah sekolah 35 dengan jumlah guru dan kepala sekolah 399 orang (Hasthoro, 2016:24). Wilayah kabupaten Banggai Laut merupakan wilayah baru. Pada tahun 2014 wilayah ini memisahkan diri dengan wilayah kabupaten Banggai Kepulauan. Sehingga banyak daerah-daerah masuk dalam daftar daerah tertinggal termasuk wilayah yang paling jauh yaitu Pulau Masoni tepat di Desa Sonit perbatasan Sulawesi Tengah bagian timur yang berhadapan langsung dengan Pulau Taliabo Provinsi Maluku Utara yang masuk juga dalam daftar wilayah tertinggal di Indonesia.

b. Kondisi Geografis

Kondisi geografis di Pulau Masoni sangat mempengaruhi perkembangan sekolah, dapat dilihat dari akses sekolah ke Kabupaten memerlukan 8-10 jam menggunakan kapal laut yang beroperasi satu minggu sekali. Kondisi ini yang menjadi alasan awal keterlambatan pembangunan sekolah. Aksesnya yang sangat jauh dari pemerintah membuat pengelola sekolah kesulitan untuk mencari dana dengan pihak luar.

c. Minimnya Anggaran Sekolah

Anggaran sekolah dilibatkan sepenuhnya kepada yayasan, masyarakat dan sedikit dari pemerintah melalui dana BOS. Namun, anggaran di SMP KSM masih sangat sedikit untuk melakukan perubahan pada sekolah. Misalnya anggaran pembangunan sekolah sampai sekarang belum tersedia sehingga ruangan kelas di SMP KSM Sonit harus di batasi dengan tripleks agar mencukupi untuk ruang proses belajar mengajar.

d. Kurangnya Jumlah Guru

Pendidik atau kata lain guru merupakan kunci tombak keberhasilan sekolah dengan adanya guru yang berkompeten dibidangnya akan membawa dampak yang sangat baik terhadap sekolah. Guru di SMP KSM Sonit, hanya ada 4 orang saja sebagai pendidik, 1 orang kepala sekolah dan 1 orang tenaga administrasi. SMP KSM Sonit memang perlu adanya penambahan jumlah guru agar jam kerja guru untuk mengajar peserta didik bisa berjalan dengan efektif dan juga kepala sekolah bisa fokus untuk membangun sekolah.

e. Kurangnya Jumlah Peserta Didik

Jumlah murid di SMP KSM Sonit yaitu 39 orang. Peserta didiknya hanya berada di wilayah Pulau Masoni. Tiap tahunnya yang mendaftar di SMP KSM Sonit hanya kurang lebih 10-15 orang bahkan pernah hanya 7 orang saja. Hal ini karena SMP KSM Sonit hanya menunggu seberapa banyak lulusan Sekolah Dasar yang ada di Pulau Masoni.

f. Minimnya Fasilitas Sarana Dan Prasarana

Fasilitas SMP KSM Sonit dari Sarana dan prasarannya masih sangat perlu diperhatikan, dimana sekolah ini hanya terdapat satu buah gedung dan di dalamnya terdapat dua ruangan. Ruang tersebut merupakan tempat proses pembelajaran dilakukan dan tempat guru, staf administrasi dan kepala sekolah. Karena kondisi ruangan tidak

mencukupi, ruangan dipetak menggunakan tripleks dimana kelas VII, VIII, ruang kepala sekolah, dan ruang dewan guru berada satu ruangan dan kelas IX bersama mini perpustakaan satukan dalam satu ruangan.

Kesimpulan

Implementasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat di SMP KSM Sonit Pulau Masoni Perbatasan Sulawesi Tengah, memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan sekolah yang dikembangkan oleh masyarakat. Beberapa tahap yang dilaksanakan oleh masyarakat Pulau Masoni perbatasan Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan pendidikan berbasis masyarakat yaitu tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan. Program yang telah dilaksanakan di SMP KSM Sonit yaitu proses belajar mengajar, Pramuka dan pengembangan budidaya rumput laut. Pelaksanaan pendidikan di Pulau Masoni, tidak berjalan secara baik karena terjadi beberapa hambatan, diantaranya, Pulau Masoni masuk daerah tertinggal, kondisi geografis, minimnya anggaran sekolah, kurangnya jumlah guru, peserta didik dan minimnya fasilitas sarana prasarana sekolah.

Daftar Pustaka

- Agung, Iskandar. 2012. "Kajian Penyelenggaraan Pendidikan Di Daerah Perbatasan." *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD* NI 7 (2): 173-84.
- Arikunto, Suharsimi, and Lia Yuliana. 2012. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Asri, Syachrumayah. 2017. "Kebijakan Pemerataan Dan Peningkatan Mutu Pendidikan Di Wilayah Perbatasan." *Cendekia: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 1 (1).
- Djafar, Zainuddin. 2008. "Masyarakat Perbatasan RI-Malaysia Dan Kasus Askar Wataniah: Relevansi Perubahan Kebijakan Kesejahteraan." *Jurnal Masyarakat & Budaya* 10 (1).
- <https://www.tribunnews.com/internasional/2019/12/04/daftar-peringkat-pendidikan-di-dunia-indonesia-jauh-tertinggal-dari-malaysia-dan-brunei-mengapa-diakses-pada-tanggal-16-september-2020-jam-13.00-wib>.
- Itasari, Endah Rantau. 2018. "Implementasi Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara Indonesia Di Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 4 (2).
- Juditha, Christiany. 2014. "Tingkat Literasi Media Masyarakat Di Wilayah Perbatasan Papua." *Journal Communication Spectrum* 3 (2).
- Machali, Imam. 2012. "Islam Memandang Hak Asasi Pendidikan." *Jurnal Pendidikan Islam* XVII (1).

- Machali, Imam, and Ara Hidayat. 2018. *The Handbook Of Education Management: Teori Dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di Indonesia*. Cet. ke-II. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Masdudi. 2014. "Demokratisasi Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Jurnal Edueksos* III (2).
- Masduki, Moh. 2019. "Pendidikan Berbasis Masyarakat Dalam Pendidikan Islam." *Qalamuna* 11 (2).
- Mulyasa, E. 2003. *Menjadi Kepala Sekolah Professional*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muri'ah, Siti. 2018. "Strategi Pengembangan Pendidikan Wilayah Perbatasan (Studi Kasus Pada Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas Sebatik Dan Nunukan)." *FENOMENA* 10 (2).
- Nurdin, Diding. 2012. "Model Manajemen Pendidikan Nilai Berbasis Sekolah, Keluarga, Dan Masyarakat." *Jurnal Administrasi Pendidikan* XIV (1).
- Prasojo, Zaenuddin Hudi. 2013. "Dinamika Masyarakat Lokal Di Perbatasan." *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 21 (2). doi:10.21580/ws.2013.21.2.252.
- Qur'ani Habib, Abdau, and Imam Machali. 2016. "Efektivitas Penerapan Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Perspektif Balanced Scorecard Terhadap Mutu Pembelajaran Siswa Kelas XI Dan Kelas XII Di MAN Maguwoharjo Sleman." *Jurnal Pendidikan Madrasah* 1 (2): 213–32.
- R.A.P, Tristania. 2015. "Terpaan Media Pada Masyarakat Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia Di Provinsi Riau." *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan* 16 (2).
- Sodiah. 2016. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam Berbasis Masyarakat Dan Sekolah." *Sosial Budaya* Vol. 13 (No. 1): 89–100.
- Soter, I Ketut. 2018. "Manajemen Pendidikan Berorientasi Masa Depan." *Jurnal Bawi Ayah* Volume 9 (Nomor 2).
- Suciati, Ariningsih. 2016. "Pengembangan Model Pendidikan Menengah "Sekolah Kebangsaan " Di Daerah Terpencil, Tertinggal, Terluar Dan Perbatasan Sebagai Implementasi Pembelajaran PKn." *JURNAL MORAL KEMASYARAKATAN* 1 (1).
- Suharto, Toto. 2005. "Konsep Dasar Pendidikan Berbasis Masyarakat." *Cakrawala Pendidikan* XXIV (No. 3).
- Suwandi. 2017. "Manajemen Pendidikan Life Skill (Studi Pondok Pesantren Al Istiqomah Desa Tanjungsari Kebumen)." *Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam Dan Studi Sosial* Cakrawala 1 (1).
- Wasito, Herman. 1997. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta: PT Gramedia Utama.
- Wijaya, Antony, and Dkk. 2009. "Manajemen Konflik Sosial Dalam Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Pertentangan Dan Pertikaian Nelayan Tradisional Di Kelurahan Pasar Bengkulu Dengan Nelayan Modern Di Kelurahan Kandang Kota Bengkulu)." *Wacana* 12 (2).
- Yustiani. 2018. "Nasionalisme Melalui Pendidikan Di Sekolah Pada Siswa SMA Di Wilayah Perbatasan Kalimantan Barat." *Jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi Dan Tradisi* 04 (01): 111–24.

Riwayat Penulis

Trisandi, S.Pd., lahir di Desa Kasuari Kecamatan Boka Kepulauan Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 30 desember 1995. Pendidikan dasar sampai sekolah menengah atas diselesaikan di kota kelahiran kota Banggai Laut sampai pada tahun 2014. Setelah itu penulis melanjutkan studi sarjana di Provinsi Gorontalo tepatnya di IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi dengan gelar sarjana pendidikan (S.Pd) predikat Cum Laude. Setelah itu penulis melanjutkan studi magister di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan.

Beberapa karya penulis telah terpublikasi diantaranya:

- Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) di Daerah Perbatasan: Studi di SMP N 2 Boka Kepulauan, Banggai Laut, Sulawesi Tengah (Manageria: *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Volume 4, Nomor 2, November 2019 dan Telah dipresentasikan pada kegiatan nasional (ACOMT) dari kementerian agama Yogyakarta)
 - Pengaruh pengelolaan guru kelas terhadap efektivitas proses pembelajaran di MA Muhammadiyah kabila provinsi Gorontalo
 - Goresan Qalbu (Ajang Puisi Nasional Tahun 2020)
 - Identity Achievement Pada Perempuan Muslim Dalam Ruang Publik: Studi Pada Perempuan Muslim Minang yang menolak Pekerjaan untuk Menanggalkan Jilbab (Telah dipresentasikan pada kegiatan nasional (Graduate forum) pasca sarjana UIN Yogyakarta tahun 2019)
- Potret Pendidikan Masyarakat Suku Sama-Bajau Di Tengah Era Disrupsi: Studi Di Pulau Masoni Pesisir Perbatasan Sulawesi Tengah (Telah di bukukan pada kegiatan fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan program magister tahun 2020).

Lampiran

Data-data penelitian lapangan (data-data sekolah yang terkait):

1. Hasil wawancara bersama ketua Yayasan SMP KSM Sonit, pada tanggal 04 September 2020 jam 14.00-15.30 wita.
2. Hasil wawancara bersama kepala sekolah SMP KSM Sonit, pada tanggal 08 september 2020 jam 10.00-11.30 Wita.
3. Hasil wawancara bersama Guru KSM Sonit, pada tanggal 09 september 2020 jam 09.00-10.30 wita.